

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Perencanaan kebencanaan di Kabupaten Tabanan telah disusun sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 yang disenergiskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2021-2026. Dokumen perencanaan kinerja tersebut telah mengamanahkan untuk menjadikan Tabanan sebagai kabupaten tangguh bencana dimulai dari desa

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan rasa aman masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai pada masa satu tahun. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Pelimpahan Kewenangan merupakan prasyarat mutlak untuk tercapainya pemerintahan yang efektif dan efisien. Keberanian Pemerintah Kabupaten/kota untuk melimpahkan sebagian kewenangan kepada OPD merupakan tantangan yang cukup berat seiring dengan tarik ulur berbagai kepentingan yang ada di dalamnya. Menjawab tantangan ini adalah tugas besar yang harus dilaksanakan, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah betul-betul merupakan wilayah kerja sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, sebagai pelaksana teknis kewilayahan dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance*, merupakan dambaan setiap warga negara. Untuk mendukung gerakan tersebut, Presiden Republik Indonesia, menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999. Inpres Nomor 7 tahun 1999 mewajibkan setiap pejabat eselon 2 ke

atas menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) dan melaporkan hasil pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan membuat Rancangan Rencana Kerja Tahunan.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah memuat usulan Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan serta kerangka Pendanaan Daerah, Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, Agenda PD dan rencana resmi Daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra PD) dengan Rancangan Renja K / L dan Rancangan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top-Down (Atas-Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program-program jenjang pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan Botom-Up (Bawah-Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, *Top Down* dan *Botom-Up* diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau

musrenbang. Rencana Kerja (RENJA) PD BPBD Tahun 2023 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Tabanan, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan Hukum Rencana Kerja (RENJA) Perrubahan Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusionil : UUD 1945
3. Landasan Operasional :

Landasan operasional penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan BPBD Kabupaten Tabanan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undag Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5679) ;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
- g. Peraturan daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
- h. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 46) ;
- i. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/1187/02/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud :

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai acuan dalam melakukan evaluasi hasil kinerja perangkat Daerah.

Tujuan :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan.
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023.
3. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 129 menyatakan “Hasil perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup

Adapun isi ringkas atas rancangan awal rencana kerja perangkat daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan	:	Pada bagian ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan rencana kerja BPBD.
Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	:	Pada bagian ini memuat evaluasi pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan tahun lalu dan capaian tahun lalu, analisa kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, reviu terhadap rancangan RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	:	Pada bagian ini memuat telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja dinas, program dan kegiatan.
Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	:	Pada bagian ini memuat rencana kerja, indikator kinerja, dan pendanaan, serta sasaran kegiatan.
Bab V. Penutup	:	Pada bagian ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dan rencana tindak lanjut

BAB. II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan telah mensinergiskan RPJMD Semesta Berencana dengan Renstra karena tahun 2021 adalah tahun terakhir periode Renstra 2016-2021 dan Renstra 2021-2026 telah disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Semesta berencana tahun 2021-2026.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah diamanahkan melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Bidang urusan yang dilaksanakan adalah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sehingga dalam mendukung pencapaian indikator RPJMD Semesta Berencana di tujuan 1 yakni terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan dengan sasaran terwujudnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga. Indikator yang diukur yaitu rata-rata persentase capaian SPM 6 pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Bagian Tata Pemerintahan Setda Tabanan mengkoordinasikan perangkat daerah BPBD, Kesbangpol, dan Satpol PP dalam pemenuhan kriteria kinerja TRANTIBUMLINMAS yang diinput dalam aplikasi Kementerian Dalam Negeri : spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/form/5102/4/2022 dan nilainya dikeluarkan oleh Ditjen Pembangunan Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja program dan kegiatan tahun 2022 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan yang tersaji dalam tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel : II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Tabanan

PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	2020	2022	2022	8=(7/6)	2023	10=(5+7+9)	11
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	20	01	01	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	20	06		Pengdaan Sarana dan Prasarana kantor	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	20	06	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur dan Relawan yang memperoleh bintek/pelatihan	40 orang	0	40 orang	40 orang	100%	50 orang	58 orang	55 orang
1	20	15		Pelatihan Tanggap Bencana	Persentase Personil BPBD dan Relawan yang mendapat Pelatihan Penanggulangan Bencana	40 orang	0	40 orang	40 orang	100%	50 orang	58 orang	55 orang
1	20	15	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase serapan anggaran sesuai target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah Dokumen Sakip tersedia	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	3 Dok	3 Dok	3 Dok
				Pendataan Data Aset	Jumlah Dokumen Aset yang tersedia	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	1 Dok

				Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Menurunnya Indeks resiko Bencana	150,43	153.6	153,50	153,30	96,09	150,43	0	149.40
				Peningkatan Pemahaman kebencanaan di kabupaten Tabanan	Jumlah Masyarakat yang mendapat pemahaman kebencanaan	50 orang	0	40 orang	43 orang	107,5%	50 orang	58 orang	100 orang
				Penyusunan Peta Evakuasi Tsunami	Peta Evakuasi Tsunami Daerah Pesisir	0	0	0	0	0	0	0	0 dok
				Reviu Rencana Penanggulangan Bencana (PRB)	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	1 dok	0	0	0	0	1 dok	0	0 dok
				Dokumen Rencana Kontijensi Per Ancaman	Dokumen Rencana Kontijensi Per ancaman	0 dok	0	0	0	0	0	0	0 dok
				Gelar Kesiapsiagaan dan Simulasi Bencana di Kab. Tabanan	Jumlah Gladi ruang dan Lapang Penanggulangan Bencana	1 kali	0	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	1 kali
				Penyusunan Produk Hukum Penanggulangan bencana	Produk Hukum Perda dan Perbup Penanggulangan Bencana	1 Perbup	0	1 Perbup	1 Perbup	100%	1 Perbup	0 Perbup	1 Perbup
				Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa yang memiliki kapasitas dalam	1 Desa	0	1 desa	1 desa	100%	1 desa	0 desa	12 Desa

					penanggulangan Bencana								
				Pembentukan Sekolah Aman Bencana	Jumlah Sekolah yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan bencana	1 Sekolah	0	1 sekolah	1 sekolah	100%	1 sekolah	1 sekolah	1 Sekolah
				Pemberdayaan Tim Koordinasi penanggulangan Bencana Kab. Tabanan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan tim Penanggulangan bencana Kab. Tabanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pengadaan/Pemasangan Tanda rambu Bahaya di Kab. Tabanan	Jumlah Tanda Rambu Bahaya yang tersedia	1 rambu	0	1 rambu	1 rambu	100%	1 rambu	0 rambu	1 rambu
				Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase Korban yang mampu tertangani sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyusunan Protap Tanggap darurat	Dokumen Protap Tanggap Darurat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
				Penunjang TRC	Persentase Jumlah Kejadian/korban yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				Pengelolaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Kejadian/Korban yang dtangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Siaga Rupusdalops Penanggulangan Bencana	Persentase Informasi Kebencanaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7 orang
				Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase korban yang direhabilitasi dan di Rekonstruksi sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pengecekan Verifikasi dan Monitoring Bencana	Persentase Jumlah Korban yang dapat ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber :BPBD, 2023

1. Realisasi fisik program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
Semua program dan kegiatan pada BPBD Kabupaten Tabanan untuk tahun anggaran 2022 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100 %).
2. Realisasi Program / Kegiatan penanggulangan bencana pada BPBD tergantung besar kecilnya bencana yang terjadi di Kabupaten Tabanan, dan semua usulan dan pengaduan masyarakat yang terdampak bencana sudah dapat diakomodir pada program dan kegiatan atau sudah 100 %
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra pada target capaian program Renstra tahun 2021 – 2026 tidak semua tercapai 100% dari target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja).
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor – faktor penyebab terbatasnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan adalah memaksimalkan pemakaian seluruh Sarana yang ada untuk menunjang kegiatan, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan dengan cara menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi dan Staf.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam mencapai kinerja pelayanan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Tabanan, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam Penerapan dan Pencapaian SPM. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan Dasar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam peraturan tersebut adalah :

- a. Pelayanan informasi rawan bencana;
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Tabanan. Hasil pengukuran dan analisis kinerja BPBD melalui indikator SPM, indikator kinerja daerah, dan indikator program telah diukur dan dianalisis seperti tabel berikut ini.

a. Capaian Indikator SPM

Indikator kinerja 6 SPM (rata-rata persentase capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial). Bagian Tata Pemerintahan Setda mengkoordinasikan perangkat daerah BPBD, Kesbangpol, dan Satpol PP dalam pemenuhan kriteria kinerja TRANTIBUMLINMAS yang diinput dalam aplikasi Kementerian Dalam Negeri : spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/form/5102/4/2022 dan nilainya dikeluarkan oleh Ditjen Pembangunan Daerah. Tahun 2022 capaian kinerjanya adalah 85,65 atau masih dibawah target 100%. Hasil pengukuran kinerja seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Capaian pengukuran SPM 2021-2022

SPM	Indikator	Reaalisasi / tahun	
		2021	2022
Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga	Rata-rata persentase Capaian SPM 6 Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial)	99,15	85,65%

Sumber : Laporan Tahunan, 2022

b. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capain kinerja ini mendukung capaian indikator indikator kinerja tujuan BPBD dan indikator RPJMD SB yaitu :

- menurunkan indeks risiko bencana. Tahun 2022 dengan capaian 99,87% atau di bawah target 100% dengan sumber data dari hasil evaluasi 71 indikator dan 284 pertanyaan penilaian indikator ketahanan daerah yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap reformasi birokrasi yang difasilitasi Inspektorat dengan nilai 83,3. Hasil pengukuran kinerja seperti

tabel berikut ini.

2.2 Capaian pengukuran IKD 2021-2022

No	Tujuan	Indikator	Reaalisasi / tahun	
			2021	2022
1	Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	154.0	153,3
2	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD	Hasil evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	83,0	83,3

Sumber : Laporan Tahunan, 2022

c. Capaian Indikator Kinerja Utama

BPBD dalam mencapai 2 (dua) kinerja utama di tahun 2022 sudah mampu 100%. Hasil analisis sebagai berikut :

- Semua usulan atau pengaduan masyarakat akan kebencanaan telah dapat dilayani/ diselesaikan secara administarsi oleh manajemen BPBD dan secara teknis oleh TRC (Tim Reaksi Cepat) BPBD dengan dukungan 35 orang personal yang bertugas dua sip yang terbagi 4 (empat) kelompok sehingga 24 jam personal TRC siaga.
- Akuntabiitas kinerja perangkat daerah yang dinilia oleh Isepktorat melalui dokumen LKjIP seagai bagaind ari dokuemn SAKIP sudah memperoleh nilai 77,87 atau BB. Hasil pengukruan kinerja seperti tabel berikut ini

2.3 Capaian pengukuran IKU 2021-2022

No	Sasaran	Indikator	Reaalisasi / tahun	
			2021	2022
1	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	A	BB

Sumber : LKJIP, 2022

d. Capaian Indikator Kinerja Program

Pencapaian indikator kinerja dua program sudah 100% Hasil analisis sebagai berikut :

- persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD sudah terlaksana 100% dalam menunjang kelancaran aministrasi dan kelancaran pelayanan publik.
- prosentase penanganan prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana

yang sudah terealisasi 100% dengan waktu tanggap bencana 24 jam 7 hari kerja. Hasil pengukruan kinerja seperti tabel berikut ini

2.4 Capaian pengukruan indikator program 2021-2022

No	Program	Indikator	Reaalisasi / tahun	
			2021	2022
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	100%
2	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	100%	100%

Sumber : LKJIP, 2022

e. Capaian IKK

Pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan pada prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana didukung oleh 5 (lima) capaian indikator sub kinerja kegiatan yang sudah juga terealisasi 100% karena didukung 5 (lima) output masing-masing sub kegiatan yang sinergis dengan indikator 3 (tiga) kegiatan. Hasil analisisnya :

- telah tersusun dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) sebagai pedoman dalam pra bencana, tanggap bencana,dan pasca bencana.
 - telah dilakukan edukasi dan sosialisiasi sebanyak 40 orang (4 orang di masing-masing kecamatan).
 - ada dua desa yaitu desa Beraban dan desa Kelating yang difokuskan mendapat edukasi kesiapsiagaan bencana.
 - sudah dilakukan survey dan pengusulan tanggap darurat sesuai prosedur yang sumebr dananya ada di Badan Keuangan Daerah.
 - sudah dilakukan penangulangan bencana di setiap usulan dan pengaduan masyarakat yang ditangani Tim Reaksi Cepat.
 - telah dilakukan penyempurnaan administrasi keuangan, manajemen perkantoran dalam tata kelola pemerintahan yang baik mulai dari peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi secara berkala sehingga dapat menekan penyimpangan yang terjadi.
 - telah melakukan penyempurnaan pelayanan sesuai SOP dan standar pelayanan sesuai pakta integritas dalam mendukung reformasi birokrasi.
- Hasil pengukruan kinerja pelayanan seperti tabel berikut ini

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Persentase penangan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	Program Penanggulangan Bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		10 Kec	10 Kec	10 Kec	10 Kec	10 Kec	10 Kec	10 Kec	10 Kec	
2	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase aparat,tokoh masyarakat, anak-anak sekolah dan relawan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rasio jumlah kejadian bencana yang dapat ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
B	Persentase Administrasi Perkantoran yang			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	mendukung tugas dan fungsi BPBD											
3	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun			3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	
4	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase administrasi BMD pada BPBD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD		Persentase aparat, tokoh masyarakat, anak-anak sekolah dan relawan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Wilayah kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan mencakup 10 (sepuluh) kecamatan. Hasil perumsan isu-isu staretgis yang dihadapi seperti berikut ini.

- 1. Terkait dengan tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, BPBD selalu siaga melayani masyarakat yang mana kantor terbuka 24 jam selama 7 hari, bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan kebencanaan bisa melalui lewat telepon BPBD (0361) 811171. Struktur kepegawaia yang disajikan seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Data ASN pada BPBD

Uraian	Jumlah ASN		Keterangan
	2020	2021	
Struktural	5 orang	5 orang	Eselon IIIa, IVa
Fungsional Teknis	0 orang	0 orang	Belum ada
Fungsional Umum	15 orang	15 orang	Pelaksana di sekretariat dan bidang
Tim Reaksi Cepat (TRC)	35 orang	35 orang	Staf lapangan non ASN
Tenaga Kontrak	12 orang	12 orang	Staf administrasi non ASN

Sumber : DUK, 2022

Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan antara lain:

- 1. Pengurangan risiko bencana menjadi perioritas khususnya pada pusat-pusat pertumbuhan pembangunan;
 - 2. Masih kurangnya atau terlambatnya informasi terkait dengan kebencanaan;
 - 3. Sinergitas pemangku kepentingan penanggulangan bencana masih perlu ditingkatkan;.
 - 4. Peningkatan kapasitas kebencanaan
- 2. Setiap Perangkat Daerah pasti memiliki permasalahan masing-masing untuk itu adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di BPBD :
 - a. Terbatasnya jumlah PNS di BPBD sehingga pendistribusian tugas-tugas/ pekerjaan banyak yang rankap tugas sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi pada BPBD.
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana seperti belum memiliki kantor dan gudang yang layak, area parkir baik, yang mana keberadaan saat ini masih menggunakan area badan jalan raya sehingga

dalam melaksanakan tugas, fungsi serta pelayanan reaksi cepat belum maksimal.

- c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan kegiatan di BPBD, hal ini disebabkan karena terbatasnya APBD Kabupaten Tabanan.

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan terhadap capaian Program bahwa pelaksanaan seluruh program yang telah dilaksanakan sangat berdampak positif atas pelaksanaan kerja terhadap masyarakat yang terdampak bencana, sehingga masyarakat bisa lebih baik dan hidup layak dalam melaksanakan kehidupannya.
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan pasti saja pernah mengalami tantangan serta peluang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu hal diatas sebagai acuan kita untuk meningkatkan pelayanan

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

- a. Urusan Perencanaan Pembangunan

Dalam usulan Perencanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2023 akan dilaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan Perangkat Daerah terkait melalui Forum OPD, dan usulan dari masyarakat lewat Musrenbang tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Kabupaten, hasil dari musrenbang tersebut akan disampaikan oleh Bapelitbang kepada OPD terkait apa saja yang menjadi permasalahan di masyarakat/ Kecamatan.

- b. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Pada tahun anggaran 2022, telah berhasil dilaksanakan oleh Perangkat Daerah BPBD melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Penanggulangan Bencana. Untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung, disamping itu pula perlu dibangunnya Kantor BPBD yang baru, karena kantor saat ini kurang layak untuk operasional BPBD.

2.4. Review terhadap RKPD Tahun 2023

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 bertipe B telah melakukan penyempurnaan rencana kerja agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyusun perencanaan kinerja jangka pendek (rancangan Renja) sudah disinergiskan dengan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah (Renstra) sehingga amanah Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMMD) Semesta Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dapat dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas BPBD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mensinkronkan rancangan awal Renja dengan ranwal RKPD dan hasil verifikasi Tim RKPD telah ditindaklanjuti dilanjutkan sehingga penjabaran RPJMD Semesta Berencana sebagai berikut :

- Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul. Madani (AUM)
- Misi : 1. Menwujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)
- Tujuan : 1. Masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan
- Indikator : Persentase capaian SDGs terhadap target rencana aksi daerah (RAD). Target tahun 2022 adalah 70%.
- Sasaran : 1.Terwujudnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga
- Indikator : Rata-rata persentase capaian SPM 6 pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, permahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, keetrtiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Target tahun 2022 adalah 100%.

Adapun review terhadap RKPD Tahun 2023 dapat kami sampaikan pada table berikut ini.

Tabel II.4
Review Terhadap RKPD Tahun 2023 Kabupaten Tabanan

No	RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	
A	Program Penanggulangan Bencana	Kabupaten Tabanan	Persentase penanganan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	100%	590.130.620						
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Kab. Tabanan	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 Kec	29.999.800	Sosialisasi, Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Per jenis Bencana)	Kabupaten Tabanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di	50 Orang	29.999.800	

								Daerah Rawan Bencana			
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Tabanan	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	240.131.100	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota	Kabupaten Tabanan	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi	1 Dok	100.000.000	
						Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kabupaten Tabanan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2 kawasan	70.000.000	
						Penanganan Pascabencana Kabupaten /Kota	Kabupaten Tabanan	Persentase pemulihan terhadap pasca bencana	100%	40.000.000	
						Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Kabupaten Tabanan	Jumlah Aparatur dan Warga negara yang mengikuti Gladi kesiapsiagaan	100 orang	30.131.100	

3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Tabanan	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	319.999.720	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten /Kota	Kabupaten Tabanan	Persentase respon penanganan darurat bencana	100%	319.999.720	
B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	BPBD Kab. Tabanan	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	3.157.441.006						
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 Dok	4.999.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	2 dok	2.999.900	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 dok	2.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPBD Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya Administrasi	100%	1.827.756.356	Penyediaan Gaji dan	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah orang yang mendapatkan Gaji dan	14 Org/bln	1.824.756.656	

			keuangan BPBD			Tunjangan ASN		Tunjangan ASN			
						Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/Semesteran SKPD	2 Lap	2.999.700	
3	Administrasi Umum Perangkat daerah	BPBD Kab. Tabanan	Persenyntase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	100%	109.818.000	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan	1 Paket	2.500.000	
						Penyediaan Peralatan	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah paket peralatan rumah	1 Paket	3.000.000	

						Rumah tangga		tangga yg disediakan			
						Penyediaan bahan logistic kantor	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	8 paket	40.000.000	
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	10.000.000	
						Penyediaan bahan/material	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah paket barang/Material yg disediakan	3 paket	14.500.000	
						Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BPBD Kab. Tabanan	Jml Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	39.818.000	
4	Pengadaan BMD Penunjang urusan PD	BPBD Kab. Tabanan	Jml Pengadaan BMD pada BPBD	3 unit	49.925.900	Pengadaan peralatan dan	BPBD Kab. Tabanan	Jml unit peralatan dan mesin	3 unit	49.925.900	

						mesin lainnya		lainnya yg disediakan			
5	Penyediaan jasa peninjang urusan Pemerintah daerah	BPBD Kab. Tabanan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100%	1.064.443.950	Penyedia an jasa Surat menyurat	BPBD Kab. Tabanan	Jml laporan penyediaan jasa Surat menyurat	150 lbr	1.500.000	
						Penyedia an jasa Komunik asi,Sumb er daya Air dan Listrik	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yg disediakan	12 lap	31.000.000	
						Penyedia an jasa pelayana n umum kantor	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan	12 lap	1.031.943.950	
6	Pemelihara an BMD Penunjang urusan	BPBD Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya BMD yg menunjang	100%	100.496.900	Penyedia an jasa pemeliha raan, biaya	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau	10 unit	69.996.900	

	Pemerintah Daerah		urusan kantor			pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		lapangan yg dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinzn			
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yg dipelihara	27 unit	30.500.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Proses yang dilakukan dalam penyusunan program/ kegiatan prioritas melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan telah dirumuskan menjadi kajian partisipatif. Usulan masyarakat yang bersifat reguler ada yang melalui musrenbang dan ada juga yang langsung menyampaikan ke BPBD. Untuk usulan kebencanaan yang sifatnya tidak terduga dari masing-masing kecamatan dilakukan penelaahan lebih mendalam.

dan selanjutnya melakukan Forum Organisasi Perangkat Daerah sehingga dapat dihasilkan rumusan kajian teknokratik.

Hasil rumusan tersebut diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten sesuai bidang prioritas pembangunan. Usulan masyarakat yang terdampak bencana juga dirumsukan agar dapat dianggarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Mengenai kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD serta prioritas pembangunan daerah meliputi :

1. Pengurangan resiko bencana menjadi perioritas khususnya pada daerah rawan bencana yang telah terpetakan dalam peta rawan risiko bencana.
2. Masih kurangnya atau terlambatnya informasi terkait dengan kebencanaan.
3. Pemenuhan pelayanan tanggap bencana belum dapat optimal karena sarana tanggap bencana dan gudang sudah rusak ringan.
4. Sinergitas pemangku kepentingan penanggulangan bencana (dari unsur pemerintah, swasta, akademisi, organisasi masyarakat, dan masyarakat umu) masih perlu di tingkatkan.
5. Peningkatan kapasitas kebencanaan di tingkat desa belum merata di 133 desa atau baru 7 desa saja terbentuk desa tangguh bencana atau 5,26%.
6. Inovasi sekolah sadar bencana yang menysar siswa SMP di wilayah rawan bencana di 12 desa pesisir belum semua terbentuk SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana).

Tabel II.5
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2023
Kabupaten Tabanan

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPBD Kab. Tabanan	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 Dok	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	28 Orang/bulan	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPBD Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	100%	
1	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
2	Penyediaan peralatan rumah tangga	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	
3	Penyediaan bahan logistic kantor	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	
5	Penyediaan Bahan/material	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	
6	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pulau Jawa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	

E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	BPBD Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	100%	
1	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 Unit	
F	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah	BPBD Kab. Tabanan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100 %	
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	150 Laporan	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	
G	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	BPBD Kab. Tabanan	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	100 %	
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	BPBD Kab. Tabanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	16 Unit	
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kab. Tabanan	Persentase penanganan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	100%	
A	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Kab. Tabanan	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 Kecamatan	
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Kab. Tabanan	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan bencana kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan tempat tinggalnya	60 Orang	
B	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Tabanan	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	
1	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kab. Tabanan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	2 Desa	
2	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan	Persentase pemulihan terhadap pasca bencana	100%	
3	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen rencana kontijensi yang dilegalisasi	1 Dokumen	

4	Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Tabanan	Jumlah aparaturn dan Warga Negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	100 Orang	
C	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Tabanan	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	
1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan	Persentase terlaksananya tim respon cepat penanganan darurat bencana	100 %	

Sumber : Renstra, 2021-2026

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah

a. Telaah terhadap kebijakan pemerintah pusat

Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 mengamanahkan pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab pada penanggulangan bencana. Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 mengamanahkan penanggulangan bencana sebagai urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional di bawah koordiansi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD di seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia dalam pra bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana terus berkoordinasi sehingga program kerja sinergis dalam penanggulangan bencana.

b. Telaah terhadap kebijakan pemerintah provinsi

Kebijakan strategis pemerintah Provinsi Bali terutama pada BPBD Provinsi Bali sudah dilakukan sinkronisasi baik melalui forum perangkat daerah, rapat-rapat koordinasi, rapat-rapat teknis, dan kolaborasi dalam pra bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana sesuai kewenangannya.

Program dan kegiatan prioritas yang sinergis sesuai prioritas daerah yang diukur melalui pemenuhan SPM urusan wajib dasar, karena pemenuhan unsur SPM kabupaten/kota akan menjadi ukuran penilaian provinsi yang dikeluarkan oleh BNPB.

c. Telaah terhadap kebijakan pemerintah

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart penyelenggaraan *good governance* dan akuntabilitas publik. Peranan BPBD yang diamanahkan dalam RPJMD Semesta Berencana sangat besar, yaitu menerapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi BPBD antara lain :

1. Perumusan serta penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan :

Tujuan Rencana Kenja Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan yang hendak dicapai pada Tahun 2023 adalah : Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana.

Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh BPBD dengan Sasaran Pengurangan risiko bencana melalui Program Penanggulangan Bencana dengan 3 (tiga) Kegiatan meliputi;

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Sedangkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tabanan adalah :

Visi : *Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)*”,

MISI : misi merupakan penjabaran dari visi, yaitu serangkaian cara atau Langkah-langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan visi. Sebagai penjabaran visi pembangunan Tabanan 2021-2026, yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas: Pangan, Sandang, dan Papan; Pendidikan dan Kesehatan; jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan;

Adat, Agama, Tradisi, seni dan Budaya; dan Pariwisata, maka Misi yang diemban oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah:

1. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Aman dan Nyaman dalam Perikehidupan (Aman)
2. Membangun Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)
3. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemandirian Secara Sosial-Ekonomi di Berbagai Bidang yang Berkepribadian dalam Kebudayaan (MADANI)

Adapun penjabaran atas visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disinkronisasikan dengan Renstra perangkat daerah 2021-2026 adapun sinkronisasi RPJMDSB dengan Renstra BPBD seperti berikut ini.

Tabel 3.1 Visi, Misi RPJMD SB dan Tujuan PD

RPJMD SB				Renstra PD
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan
Nangun Sat Kertih Loka Bali melalui PPSB di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru : Aman Unggul Madani	Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)	Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan	1.1 Terjaminnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga	Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana
	Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)	Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan	2.2Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di perangkat daerah
	Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)	Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan	4 Sasaran	-

Sumber : Resntra BPBD, 2022

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Tabanan. Tahun 2023, pada BPBD Kabupaten Tabanan terdapat 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan.

Dalam rangka pelaksanaannya maka program, kegiatan dan pendanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Program Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Tabanan Tahun 2023 :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini direncanakan akan dapat mendukung perencanaan kinerja yang akuntabel dan mendorong kelancaran administrasi keuangan dan pelayanan publik.
- b. Program Penanggulangan Bencana. Program ini direncanakan akan mendukung pencapaian kinerja SPM dan indikator kinerja BPBD dalam pelayanan pra bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana, sehingga semua usulan dan pengaduan masyarakat dapat terlayani dalam mendukung misi pertama RPJMD SB.

Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Tabanan Tahun 2023 meliputi :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah
- g. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- h. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- i. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Hasil kajian teknokratik telah disusun rumusan program dan kegiatan prioritas dengan target kinerja dan kebutuhan dananya yang disajikan seperti berikut ini.

Tabel III.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN TABANAN
PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01	BPBD				5.979.642.800				5.979.642.800
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	BPBD Kab. Tabanan	100%	5.049.642.800			100%	5.049.642.800
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	BPBD Kab. Tabanan	3 Dokumen	6.000.000	APBD		3 Dokumen	6.000.000
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD Kab. Tabanan	2 Dokumen	3.500.000	APBD		2 Dokumen	3.500.000
1.05.01.2.01.07	Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD Kab. Tabanan	1 Laporan	2.500.000	APBD		1 Laporan	2.500.000

1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	BPBD Kab. Tabanan	100%	3.658.998.000	APBD		100%	3.658.998.000
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Kab. Tabanan	28 Orang	3.655.498.000	APBD		28 Orang	3.655.498.000
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPBD Kab. Tabanan	2 Laporan	3.500.000	APBD		2 Laporan	3.500.000
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	BPBD Kab. Tabanan	100%	155.500.000	APBD		100%	155.500.000
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	BPBD Kab. Tabanan	1 Paket	2.500.000	APBD		1 Paket	2.500.000
1.05.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	BPBD Kab. Tabanan	1 Paket	3.500.000	APBD		1 Paket	3.500.000
1.05.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	BPBD Kab. Tabanan	1 Paket	50.000.000	APBD		1 Paket	50.000.000

1.05.01.2.06.0 5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BPBD Kab. Tabanan	2 Paket	10.000.000	APBD		2 Paket	10.000.000
1.05.01.2.06.0 7	Penyediaan Bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	BPBD Kab. Tabanan	3 Paket	14.500.000	APBD		3 Paket	14.500.000
1.05.01.2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD Kab. Tabanan	2 Laporan	70.000.000	APBD		2 Laporan	70.000.000
1.05.01.2.06.0 1.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPBD Kab. Tabanan	4 Dokumen	5.000.000	APBD		4 Dokumen	5.000.000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	BPBD Kab. Tabanan	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000
1.05.01.2.07.0 6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	BPBD Kab. Tabanan	8 unit	100.000.000	APBD		8 unit	100.000.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	BPBD Kab. Tabanan	100%	1.001.844.800	APBD		100%	1.001.844.800
1.05.01.2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	BPBD Kab. Tabanan	150 lembar	1.500.000	APBD		150 lembar	1.500.000
1.05.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber	BPBD Kab. Tabanan	3 Laporan	32.000.000	APBD		3 Laporan	32.000.000

		daya Air dan listrik yg disediakan							
1.05.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	BPBD Kab Tabanan	12 Laporan	968.344.800	APBD		12 Laporan	968.344.800
1.05.01.2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	BPBD Kab Tabanan	100 %	127.300.000	APBD		100 %	127.300.000
1.05.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau laporan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	BPBD Kab Tabanan	12 unit	76.800.000	APBD		12 unit	76.800.000
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	BPBD Kab. Tabanan	16 unit	50.500.000	APBD		16 unit	50.500.000
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penangan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	Kab. Tabanan	100%	930.000.000	APBD		100%	930.000.000
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	Kab. Tabanan	10 Kecamatan	40.000.000	APBD		10 Kecamatan	40.000.000
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah orang yang mendapatkan Soisalisasi,	Kab. Tabanan	60 Orang	40.000.000	APBD		60 Orang	40.000.000

	Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan tempat tinggalnya							
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	Kab. Tabanan	100%	290.000.000	APBD		100%	290.000.000
1.05.03.2.02.06	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kab. Tabanan	2 Desa	80.000.000	APBD		2 Desa	80.000.000
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan terhadap pasca bencana	Kab. Tabanan	100%	60.000.000	APBD		100%	60.000.000
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	Kab. Tabanan	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah aparaturnya dan warga Negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	Kab. Tabanan	100 orang	50.000.000	APBD		100 orang	50.000.000

1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Tabanan	100%	600.000.000	APBD		100%	600.000.000
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase respon penanganan darurat bencana	Kab. Tabanan	100 %	600.000.000	APBD		100 %	600.000.000

Sumber : Forum OPD, 2023

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Perencanaan Pendanaan

Dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditentukan akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan serta pendanaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam mengemban misi pertama yaitu Menwujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman) akan dapat diwujudkan dengan kerjasama kolaboratif pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Hasil rumusan dalam merencanakan prorgam dan kegiatan prioritas di Tahun 2023, maka direncanakan pendanaan di tahun 2023 dirancang bersumber dari APBD Kabupaten dan didukung dari APBN, CSR (BUMN dan swasta), dan APBD Provinsi untuk mendukung pra bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana.

Untuk sinkronisasi program, maka telah diusulkan melalui dana APBN ke BNPB dan melalui APBD Provinsi seperti berikut ini.

No	Uraian	Volume	Tujuan usulan
A	APBN		
1	Chainsaw kecil	4 unit	BNPB
2	Chainsaw sedang	4 unit	BNPB
3	Chainsaw besar	2 unit	BNPB
4	Senter kepala	15 unit	BNPB
5	Tali tambang climbing	1 gulung	BNPB
6	Mobil skylift	1 unit	BNPB
7	Tandu	4 unit	BNPB
B	APBD Provinsi		
1	Pelatihan manajemen dasar penanggulangan bencana	1 paket	BPBD provinsi
2	Pelatihan gelar peralatan	1 paket	BPBD provinsi
3	Bimbingan teknis Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	1 paket	BPBD provinsi

4.2 Indikator Kinerja

Sesuai amanah peraturan kinerja, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah merumuskan sinergisitas program, kegiatan, sub kegiatan dengan indikator dan targetnya dapat terukur secara berkala. Dukungan anggaran di masing-amsing sub kegiatan sudah diselaraskan dengan hasil musrenbang, Forum OPD, dan kajian teknokratik. Hasil analisis TA 2023 masih kurangnya dukungan anggaran di beberapa sub kegiatan untuk mendukung pelayanan kebencanaan yang dapat kami tuangkan dalam Tabel IV.1a dibawah ini.

Tabel IV.1a

**RUMUSAN RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
KABUPATEN TABANAN**

PD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Pendanaan			
		Induk 2023		Usulan Perubahan 2023	
		Target	Dalam Jumlah (Rp).	Dalam Jumlah (Rp).	+ / _
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	3.044.514.256	3.511.968.456	467.454.200
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 Dokumen	4.999.900	4.999.900	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	2 Dokumen	2.999.900	2.999.900	0
Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Dokumen LKjIP	1 Laporan	2.000.000	2.000.000	0

Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	1.827.755.656	2.245.127.656	417.372.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Outcome: Nilai LKjIP Output:Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	28 Orang/bulan	1.824.756.656	2.242.128.656	416.871.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Aset yang tersedia	2 laporan	3.500.000	2.999.000	0
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	100%	45.701.200	89.153.200	43.452.000
Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah paket Komponen instalasi listrik tersedia	1 paket	1.498.200	1.498.200	0
Penyediaan peralatan rumah tangga	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah paket peralatan rumah tangga yg tersedia	1 Paket	997.000	997.000	0
Penyediaan bahan logistic kantor	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah paket bahan logistic yang disedisksn	1 Paket	20.152.000	20.152.000	0
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Outcome: Nilai LKjIP Output: tersedianya barang cetak dan penggandaan	2 Paket	3.929.000	3.929.000	0
Penyediaan Bahan/material	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah paket bahan yang disediakan	3 paket	6.999.000	6.999.000	0

Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	2 Laporan	12.126.000	55.578.000	43.453.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Dokumen Penataan arsip dinamis tersedia	4 Dokumen	0	0	0
Pengadaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	100%	24.939.800	24.939.800	0
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah unit peralatan dan mesin tersedia	8 unit	24.939.800	24.939.800	0
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Outcome: Nilai LKjIP Output: Persentase terpenuhinya jasa surat menyurat	100%	1.001.844.800	1.064.443.950	62.599.150
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah laporan surat menyurat	150 Laporan	1.500.000	1.500.000	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedia	3 laporan	31.000.000	31.000.000	0
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor tersedia	12 Laporan	1.031.943.950	1.031.943.950	0
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	100 %	76.673.750	108.243.750	31.570.000

Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah kendaraan dinas operasional yg dipelihara	12 unit	61.465.000	85.935.000	24.488.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah peralatan dan mesin terpelihara	16 unit	15.208.750	22.308.750	7.100.000
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penangan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	100%	628.944.120	743.397.120	114.453.000
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 Kecamatan	14.999.900	14.999.900	0
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Outcome: Tersedianya informasi kebencanaan Output: Jumlah orang yg mendapat sosialisasi kebencanaan	60 Orang	14.999.900	14.999.900	0
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	220.129.800	227.279.800	7.150.000
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Outcome: Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Output: Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yg sah dan legal	1 Dok	100.000.000	100.000.000	0
Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Outcome: Terwujudnya desa yang paham akan bencana Output: Jumlah kawasan yang mendapat pemahaman kebencanaan	2 Desa	49.999.600	57.149.600	7.150.000

Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Outcome: Terbantunya fasilitas umum/masyarakat yg terdampak bencana Output: Persentase pemulihan terhadap pasca bencana	100%	39.999.300	39.999.300	0
Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Outcome: Meningkatnya kapasitas Daerah Output: Jumlah warga negara yg mengikuti gladi kesiapsiagaan	100 orang	30.130.900	30.130.900	0
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	393.814.420	528.717.320	134.902.900
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Outcome: Persentase penanganan korban bencana Output: Persentase terlaksananya tim respon cepat penanganan darurat bencana	100 %	393.814.420	528.717.320	134.902.900
	Jumlah Total:		3.673.498.376	4.796.682.896	581.867.200

Sumber : Usulan RKA Perubanan, 2023

Tabel IV.1b

**RUMUSAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
KABUPATEN TABANAN**

PD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
		Tahun 2024	
		Target	Dalam Jumlah (Rp).
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	5.049.642.800
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 Dokumen	6.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	2 Dokumen	3.500.000
Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Dokumen LKjIP	1 Laporan	2.500.000
Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	3.658.998.000

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Outcome: Nilai LKjIP Output:Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	28 Orang/bulan	3.655.498.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Aset yang tersedia	2 laporan	3.500.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	100%	155.500.000
Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah paket Komponen instalasi listrik tersedia	1 paket	2.500.000
Penyediaan peralatan rumah tangga	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah paket peralatan rumah tangga yg tersedia	1 Paket	3.500.000
Penyediaan bahan logistic kantor	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah paket bahan logistic yang disedisksn	1 Paket	50.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Outcome: Nilai LKjIP Output: tersedianya barang cetak dan penggandaan	2 Paket	10.000.000
Penyediaan Bahan/material	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah paket bahan yang disediakan	3 paket	14.500.000
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	2 Laporan	70.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Dokumen Penataan arsip dinamis tersedia	4 Dokumen	5.000.000
Pengadaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	100%	100.000.000

Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah unit peralatan dan mesin tersedia	8 unit	100.000.000
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Outcome: Nilai LKjIP Output: Persentase terpenuhinya jasa surat menyurat	100%	1.001.844.800
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah laporan surat menyurat	150 Laporan	1.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedia	3 laporan	32.000.000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor tersedia	12 Laporan	968.344.800
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	100 %	127.300.000
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Jumlah kendaraan dinas operasional yg dipelihara	12 unit	76.800.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah peralatan dan mesin terpelihara	16 unit	50.500.000
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	100%	930.000.000
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 Kecamatan	40.000.000
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Outcome: Tersedianya informasi kebencanaan Output: Jumlah orang yg mendapatkan sosialisasi kebencanaan	60 Orang	40.000.000

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	290.000.000
Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Outcome: Terwujudnya desa yang paham akan bencana Output: Jumlah kawasan yang mendapat pemahaman kebencanaan	2 Desa	80.000.000
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Outcome: Terbantunya fasilitas umum/masyarakat yg terdampak bencana Output: Persentase pemulihan terhadap pasca bencana	100%	60.000.000
Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Outcome: Meningkatnya kapasitas Daerah Output: Jumlah warga negara yg mengikuti gladi kesiapsiagaan	100 orang	50.000.000
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	600.000.000
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Outcome: Persentase penanganan korban bencana Output: Persentase terlaksananya tim respon cepat penanganan darurat bencana	100 %	600.000.000
	Jumlah Total:		5.979.642.800

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Kerja (Renja) Badan penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pembangunan tahunan dan penyusunan laporan kinerja. Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini juga memuat indikator yang dijadikan tolok ukur evaluasi kinerja yaitu tolok ukur capaian 1 indikator kinerja SPM, 2 indikator kinerja daerah, 2 indikator kinerja tujuan, 2 indikator kinerja utama, 2 indikator kinerja program, dan 8 indikator kinerja kegiatan.

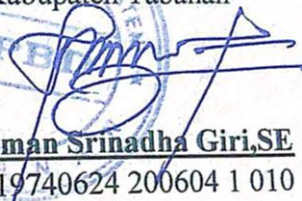
5.2 Saran dan Kaidah Pelaksanaan

Pengendalian dan evaluasi atas perencanaan kinerja akan lebih berhasil guna dengan adanya penjabaran dan rencana aksi berjenjang sehingga semua program dan kegiatan dapat menghasilkan manfaat lebih optimal. Dalam penyusunan rencana kerja ini memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
- b. Sinergisitan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
- c. Memperhatikan keberlanjutan dalam menjawab permasalahan kebencanaan sebagai wujud nyata dan tanggung jawab pemerintah dalam membangun daerah.

Tabanan, 10 Juli 2023

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan


I Nyoman Srinadha Giri, SE
NIP. 19740624 200604 1 010

Lampiran 1a

PENJABARAN PERENCANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Ranwal/Rp	Forum OPD/Rp
1	Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana	Pengurangan Risiko Bencana	Penanggulang an Bencana	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/ kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 kecamatan	40.000.000	40.000.000
				Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	290.000.000	290.000.000
				Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	100%	600.000.000	600.000.000
2	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Prencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja yang disusun	3 dokumen	6.000.000	6.000.000
				Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya	100%	3.658.998.000	3.658.998.000

					administrasi keuangan BPBD			
				Administrasi umum perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	100%	155.500.000	155.500.000
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan abrang milik daerah pada BPBD	3 unit	100.000.000	100.000.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100%	1.001.844.800	1.001.844.800
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya BMD yang menunjang urusan kantor	100%	127.300.000	127.300.000

Sumber : Forum OPD, 2024

Lampiran 1b

PENJABARAN PERENCANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

No	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Target	Ranwal	Musren	Forum OPD	Sumber usulan
1.05.01		BPBD			5.979.642.800	0	5.979.642.800	
1.05.01	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	5.049.642.800	0	5.049.642.800	
1.05.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 Dokumen	6.000.000		6.000.000	APBD
1.05.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.500.000		3.500.000	APBD
1.05.01.2.01.07		Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.500.000		2.500.000	APBD
1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	3.658.998.000		3.658.998.000	APBD
1.05.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	3.655.498.000		3.655.498.000	APBD

1.05.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.500.000		3.500.000	APBD
1.05.01.2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	100%	155.500.000		155.500.000	APBD
1.05.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	2.500.000		2.500.000	APBD
1.05.01.2.06.03		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	3.500.000		3.500.000	APBD
1.05.01.2.06.04		Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	50.000.000		50.000.000	APBD
1.05.01.2.06.05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.000.000		10.000.000	APBD
1.05.01.2.06.07		Penyediaan Bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	14.500.000		14.500.000	APBD

1.05.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	70.000.000		70.000.000	APBD
1.05.01.2.06.01.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	5.000.000		5.000.000	APBD
1.05.01.2.07		Pengadaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	100%	100.000.000		100.000.000	APBD
1.05.01.2.07.06		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit	100.000.000		100.000.000	APBD
1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100%	1.001.844.800		1.001.844.800	APBD
1.05.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	150 lembar	1.500.000		1.500.000	APBD
1.05.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrik yg disediakan	3 Laporan	32.000.000		32.000.000	APBD
1.05.01.2.08.04		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	968.344.800		968.344.800	APBD
1.05.01.2.09		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	100 %	127.300.000		127.300.000	APBD

1.05.01.2.09.02		Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau laporan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	76.800.000		76.800.000	APBD
1.05.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16 unit	50.500.000		50.500.000	APBD
1.05.03	Pengurangan risiko bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	100%	930.000.000	0	930.000.000	APBD
1.05.03.2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 Kecamatan	40.000.000		40.000.000	APBD
1.05.03.2.01.02		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan tempat tinggalnya	60 Orang	40.000.000		40.000.000	APBD
1.05.03.2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	290.000.000		290.000.000	APBD

1.05.03.2.02.06		Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	2 Desa	80.000.000		80.000.000	APBD
1.05.03.2.02.07		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan terhadap pasca bencana	100%	60.000.000		60.000.000	APBD
1.05.03.2.02.09		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	1 Dokumen	100.000.000		100.000.000	APBD
1.05.03.2.02.10		Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah aparatur dan warga Negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	100 orang	50.000.000		50.000.000	APBD
1.05.03.2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	600.000.000		600.000.000	APBD
1.05.03.2.03.02		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase respon penanganan darurat bencana	100 %	600.000.000		600.000.000	APBD

Sumber : Forum OPD, 2022